

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH INDUSTRI PT.SEMEN TONASA KABUPATEN PANGKEP**

NUR AHIRAH

Nomor Stambuk : 10564 01637 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH INDUSTRI PT.SEMEN TONASA KABUPATEN PANGKEP**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR AHIRAH

Nomor Stambuk : 10564 0163 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor ; 1773/FSP/A.1-VIII/XII/39/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar Pada hari Kamis Rabu 27 Desember 2017

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, Sos, M.Si

Penguji

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Drs. H, Mappigau Samma, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT.SEMEN TONASA
KABUPATEN PANGKEP

Nama Mahasiswa : Nur Ahirah

Stambuk : 10564 01637 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, S.H., M.M

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Ahirah
Nomor Stambuk : 10564 01637 12
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihaklain atau telah ditulis/dipublikasikan oranglain atau melaukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Nonember 2017

Yang Menyatakan,



Nur Ahirah

ABSTRAK

Nur Ahirah, 2017. Penegawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Industri PT.Semen Tonasa Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Abdul Kadir dan Muhammad Tahir.M.Si).

Pengawasan pemerintah daerah merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan – harapan yang ingin diperoleh. Berdasarkan alasan tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan proses pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang ingin mendeskripsikan fenomena-fenomena dilapangan selama penelitian dilakukan. Sumber data utama dari penelitian ini adalah data primer diperoleh dari informan dan observasi.jumlah informan sebanyak 6 orang terdiri dari sekretaris Badan Lingkungan Hidup 1 orang, staf Demertemn Jaminan Mutu PT.Semen Tonasa, Kepala Desa 1 orang, Masyarakat 3 orang Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa adalah pengawasan langsung meliputi perencanaan bagi pihak pemerintah daerah dari Badan lingkungan hidup yang terkait mengenai dampak lingkungan PT.Semen Tonasa harus lebih secara rutin lagi dalam melakukan pengawasan dan tidak henti-hentinya memantau agar hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan akan segera diatasi atau ditindaklanjuti, begitupula pengelolaan Bagi Pihak PT. Semen Tonasa diharapkan melakukan pengawasan dilingkup perusahaan sehingga sebelum dampak lingkungan PT. Semen Tonasa tidak sampai kemasyarakat dan sudah lebih awal diketahui pihak perusahaan untuk segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait mengenai AMDAL.

Pengawasan tidak langsung berupa pelaporan Pihak Kepala Desa dan Masyarakat juga diperlukan bantuan informasi untuk dilaporkan ke pihak perusahaan dan pihak yang lebih bertanggung jawab mengenai dampak lingkungan PT.Semen Toanasa Kabupaten Pangkep sehingga hal yang akan menimbulkan kerugian bagi lingkup masyarakat desa Biringere tidak sampai ke masyarakat. Hasil dari sosialisasi dengan menggunakan media dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan tahapan pengawasan ini dari hasil yang dicapai dari pihak masyarakat Biringere belum terlaksana secara efektif. hasil wawancara kepada informan yang bersangkutan dan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan.

Key Words : Pengawasan, pengelolaan Limbah, PT.Semen Tonasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur ku ucapkan karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Bapak Abdul Kadir Adys, S.H.,M.M sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir,M.Si. sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda tercinta **Hj. HABIBAH** dan **H.MAPPIABANG** yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan membantu penulis berupa materi dan non materi.
2. Suami tercinta yang selalu saya banggakan **Muh.Idham Munawir** yang selalu memberikan motivasi serta tempatku menyampaikan segala susah dan suka, tempatku bergantung selain pada keluarga.
3. Anak yang selalu saya cintai **Muh.Aska Alfarizkiy** adalah inspirasiku dan motivasi si penulis untuk mencapai gelar sarjana.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar **Dr. H. Abd Rahman Rahim.S.E.,M.M.**

5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**
6. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan **Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si** yang telah membina jurusan ilmu Pemerintahan
7. Dosen FISIP, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini..
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis
9. Teman-teman kelas B angkatan 2012 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. penulis Kepada teman-teman seperjuangan KKP kecamatan Mariso Kelurahan Bontorannu, Ramlah, , Tiara, Firman dan Iknasari yang selalu memberi semangat..

Semoga bantuan dari semua pihak akan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, 30 November 2017

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep sekitar 68 kilometer dari kota Makassar. Perseroan yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton semen per tahun ini, mempunyai empat unit pabrik, yaitu Pabrik Tonasa II, Pabrik Tonasa III, Pabrik Tonasa IV dan Pabrik Tonasa V. Keempat unit pabrik tersebut menggunakan proses kering dengan kapasitas masing-masing 590.000 ton semen pertahun untuk Unit II dan III, 2.300.000 ton semen per tahun untuk Unit IV serta 2.500.000 ton semen untuk Unit V. Perseroan berdasarkan anggaran dasar merupakan produsen semen di Indonesia yang telah memproduksi serta menjual semen di dalam negeri dan mancanegara sejak tahun 1968.

Proses produksi perseroan bermula dari kegiatan penambangan tanah liat dan batu kapur di kawasan tambang tanah liat dan pegunungan batu kapur sekitar pabrik hingga pengantongan semen zak di unit pengantongan semen. Proses produksi perseroan secara terus menerus dipantau oleh satuan Quality Control guna menjamin kualitas produksi. Lokasi pabrik perseroan yang berada di Sulawesi Selatan merupakan daerah strategis untuk mengisi kebutuhan semen di Kawasan Timur Indonesia. Dengan didukung oleh jaringan distribusi yang tersebar dan diperkuat oleh delapan unit pengantongan semen yang melengkapi sarana distribusi penjualan, telah menjadikan perseroan sebagai pemasok terbesar

di kawasan tersebut. Kedelapan unit pengantongan semen berlokasi di Bitung, Palu, Banjarmasin dan Ambon dengan kapasitas masing-masing 300.000 ton semen per tahun serta di Makassar, Bali dan Samarinda dengan kapasitas masing-masing 600.000 ton semen per tahun, dan di Pontianak dengan kapasitas 150.000 ton semen per tahun. Sarana pendukung operasi lainnya yang berkontribusi besar terhadap pencapaian laba perusahaan adalah utilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x25 MW yang berlokasi di Desa Biringkassi, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari lokasi pabrik. Proses mekanis pembuatan semen di PT. Semen Tonasa dengan menggunakan mesin-mesin dan alat-alat kerja yang disertai suara yang keras, akan meningkatkan pemaparan suara pada pekerja serta menambah resiko bahaya terhadap para pekerja.

Pembangunan pabrik Semen Tonasa Unit IV yang berlokasi tidak jauh dari unit II dan III. Yaitu desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Pabrik ini di mulai dibangun pada triwulan III tahun 1994, berdasarkan SK Menteri perindustrian No. 182/MPP.IX/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan SK Menteri Keuangan RI No.5 1549/MK.013/1990 tanggal 29 November 1990. Pabrik Semen Tonasa Unit IV dikerjakan secara swa-kelola oleh PT Semen Tonasa dibantu oleh PT Rekayasa Industri sebagai konsultan.

Pabrik Semen Tonasa Unit IV diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 September 1996, dengan kapasitas terpasang 2.300.000 ton pertahun dan menggunakan teknologi canggih. Pabrik baru ini mulai di oprasikan secara komersial pada tanggal 1 November 1996 dengan tahan percobaan terak (klinker),

maka kapasitas terpasang produk produksi PT. Semen Tonasa untuk tahun 1996 menjadi 3.480.000 ton per tahun.

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan ,masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dimana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan dan ketidakpatuhan. Masalah- masalah internal yang muncul dalam organisasi sebagian merupakan tanda bahwa sebagian fungsi di dalam lembaga tidak dilaksanakan secara sehat. Mengatasi hal ini, salah satu fungsi yang harus diberdayakan secara konsisten adalah fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian resiko manajemen, sistem pengendalian dan penataan manajemen yang sehat untuk mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup usaha.

Limbah merupakan benda yang tidak diperlukan dan dibuang, limbah pada umumnya mengandung bahan pencemar dengan konsentrasi bervariasi. Bila dikembalikan ke alam dalam jumlah besar, limbah ini akan terakumulasi di alam sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Penumpukan limbah di alam menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan limbah ini merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pendayagunaan limbah, serta pengendalian dampak yang ditimbulkannya, upaya pengelolaan limbah tidak mudah dan memerlukan pengetahuan tentang limbah unsur-unsur yang terkandung serta penangan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Selain itu perlu keterampilan mengelolah limbah menjadi ekonomis dan mengurangi jumlah limbah yang terbuang kealam. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis.limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertetu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan kemajuan teknologi oleh manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan kelangsungan hidup manusia. Dampak tersebut harus dicegah karena keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri dan teknologi tersebut. Jika keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga berubah. Padahal kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia.

Perlu adanya pengawasan terhadap limbah industri sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Untuk itu penguatan sistem dan

perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif menjadi suatu keharusan. Pengawasan pada Semen Tonasa kabupaten Pangkep yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang bertugas mengkaji Analisis mengenai dampak lingkungan. Setiap saat Amdal dapat di evaluasi untuk melihat pencemaran yang mungkin saja terjadi.

Selain memiliki dampak positif dari Semen Tonasa yaitu menghasilkan devisa atau pendapatan bagi negara, pemerintah daerah, dan pemilik saham serta menciptakan bagi lapangan kerja, bagi masyarakat negara, juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari industri semen Tonasa adalah pencemaran udara oleh debu. Debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen terdiri dari debu yang dihasilkan pada waktu pengadaan bahan baku, dan debu yang dihasilkan selama pengangkutan bahan baku ke pabrik serta bahan jadi keluar pabrik, termasuk pengantongannya.

Pencemaran industri pada Semen Tonasa kabupaten pangkep merupakan kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan Karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan yaitu tanah,air, atau udara berupa bahan buangan atau hasil sampingan dari proses produksi industri yang berbentuk padat (debu), cair (gas) yang dapat menimbulkan pencemaran. Gas yang keluar dari industri biasanya dikendalikan dengan cara memasang cerobong asap, alat penyerap atau pencegah pencemaran lainnya yang biasa dilakukan oleh industri yang berskala besar dan sebagian industri kelas menengah, masalah pembuangan limbah industri tetap menjadi sorotan utama disamping kontribusi positif industri tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu,

kehadiran sistem pengolahan limbah internal begitu penting demi menghasilkan limbah industri yang siap buang, dan tidak mencemari lingkungan. Tujuan dari pengolahan limbah adalah untuk menghasilkan limbah yang aman untuk dibuang ke lingkungan, tanpa menimbulkan kerugian atau masalah kepada masyarakat dan tentunya dapat mencegah pencemaran lingkungan.

Di bidang industri telah dikeluarkan beberapa SK seperti Surat Keputusan Perindustrian No. 134/M/SK/1988 Tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup; dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 182/MPP.IX/1990 tanggal 2 oktober 1990 Tentang Pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Pada tahun 1994 telah dikeluarkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan yang dikenal dengan PP No. 19/1994 Tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 1971 tanggal 8 September 1971, Pabrik Semen Tonasa ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1975 tanggal 9 Januari 1975 bentuk Perum tersebut diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dampak limbah Industri pada Semen Tonasa di kabupaten Pangkep tidak hanya berdampak pada lingkungan juga berdampak pada kesehatan Masyarakat sekitar. Contoh Dampak yang ditimbulkan oleh Limbah industri ini adalah Debu yang beterbangan memicu penyakit pada saluran pernafasan, perusakan Lingkungan. Disamping menghasilkan limbah yang dapat mencemari

lingkungan bila tidak dikelola secara baik, kegiatan industri juga dapat menyebabkan timbulnya bau, bising, panas, dan radiasi.

Berdasarkan masalah yang di uraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “*Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Industri PT. Semen Tonasa Di Kabupaten Pangkep*”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa Di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT. Semen Tonasa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktif sebagai berikut:

1. Akademis

Diharapkan agar dspat memperkaya konsep-konsep ataupun teori yang dapat membuat serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah PT. semen tonasa di Kabupaen Pangkep.

2. Praktis

Dalam penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang berarti maupun pelajaran-pelajaran yang berarti bagi pemerintah kabupaten Pangkep dan pelaku PT. Semen Tonasa agar pengelolaan limbah industry semen biasa semakin baik kedepan.

BAB II

TINJAUAN PUSRAKA

A. Konsep Dasar Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan public maupun kelembagaan privat, sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan sebagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, berarti minimal ada tiga aspek kekurangan dalam kelembagaan itu: pertama kelemahan dari segi perencanaan; Kedua kelemahan dari segi pelaksanaan; dan Ketiga kelemahan dari segi pengawasan.

Melihat argumentasi yang telah dikemukakan di atas yang melihat bahwa pengawasan itu begitu penting sehingga dapat menciptakan pola pertanyaan, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan pengawasan itu? Sebenarnya pengertian pengawasan itu begitu penting sehingga dapat menciptakan pola pertanyaan, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan pengawasan itu? Sebenarnya pengertian pengawasan kalau kita melihat dari asal kata dasarnya “awas” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Hal ini senada dengan pendapat Devrier dalam Budi (2009 : 259) mengatakan bahwa kata pelayanan berasal dari kata “ servis” dimana dari kata

itu ada dua pengertian yang terkandung di dalamnya yakni “ *the attendance of an inferior*” or “*to be useful*” Pengertian pertama mengandung unsur ikut serta dan pengertian kedua mengandung suatu kegunaan. Sedangkan Makmur (2011: 176) mendefinisikan bahwa pengawasan yaitu Suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan dilakukan secara baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana.

a. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi sebagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan yang diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan

dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan yaitu :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Menjegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemberosan-pemborosan

Menurut Darmawan (2014:4) fungsi pengawasan adalah :

- 1) Untuk menilai apakah pengendalian menejemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- 2) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dn tepat.
- 3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang telah menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Untuk meniliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- 5) Untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah diitetspksn.

b. Proses Pengawasan

Menurut Handoko (1998:364), proses pengawasan dari lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1) Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi, ada 3 bentuk standar yang umum:

- a) Standar-standar fisik ; meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
- b) Standar-standar moneter; yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya.
- c) Standar-standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan atau tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (tes, atau dengan pengambilan sampel 4) perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. 5) pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil.

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk:

- a) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- b) Mengubah pengukuran pelaksanaan (infeksi terlalu sering, frekuensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti system pengukuran itu sendiri.
- c) Mengubah cara dalam menganalisa dalam menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

c. Gaya-gaya Pengawasan

Seperti diuraikan oleh Saputra (1991:67) gaya pengawasan terbagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Retunisasi, pengawasan gaya ini sering dalam tindakannya dengan usaha pemberatasan perilaku. Alat yang digunakan : tugas, peraturan, dan prosedur. Pengaturan ketaan azas, dapat dipercaya, dan dapat diramalkan.

- 2) Direksi dan *surveillance*, perilaku diawasi dari luar dengan direksi (pengarahan orang lain). Direksi atau komando didukung oleh adanya kekuasaan dan kewenangan.
- 3) Regulasi, pengawasan melalui regulasi pendekatan sasaran, peranan perilaku memilih perilaku yang menghasilkan keluaran. Sistemnya menggunakan sibermetik. Tindakan dilakukan, hasil diukur, dibandingkan dengan standar, penyimpangan dicatat, dan alternatif tindakan dipilih.
- 4) Perencanaan, pengawasan melalui perencanaan dengan pendekatan hasil. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan tidak hanya mengubah elemen dalam sistem, tetapi mengubah suatu sistem dengan sistem lainnya.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Sesungguhnya banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah mereka sepakati. Menurut Makmur (2011 :186-187) Merinci jenis-jenis pengawasanyang disesuaikan dengan relitas manusia antara lain :

- 1) Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan yang bentuknya besar seperti kelembagaan yang bentuknya besar seperti kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu kompleks dan rumit maka sangat dibutuhkan pengawasan yang bersifat fungsional.
- 2) Pengawasan Masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar penyelewengan-penyelewengan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

- 3) Pengawasan administratif yaitu penataan pelaksanaan seluruh aktifitas dalam seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan.
- 4) Pengawasan teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia misalnya pekerjaan pada bidang pertanian, perikanan, industry dan lain sebagainya.
- 5) Pengawasan pimpinan yaitu pengawasan seorang pemimpin padabawahannya.
- 6) Pengawasan barang yaitu pengawasan terhadap sesuatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat pelaksana tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- 7) Pengawasan jasa yaitu pengawasan terhadap suatu barang di mana menyewa jasa sekelompok orang atau perusahaan untuk menjaga keamanan barang tersebut.
- 8) Pengawasan internal. Dalam sebuah lembaga memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub- sub kelembagaan didalamnya, misalnya legislative, yudikatif dan eksekutif. Pengawasan yang di bentuk dalam kelembagaan inilah yang di maksud dengan pengawasan internal.
- 9) Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dibentuk oleh suatu lembaga untuk mengawasi lembaga lain.

e. Gaya-gaya Pengawasan

Seperti diuraikan oleh Saputra (1991:67) gaya pengawasan terbagi menjadi empat, yaitu :

- 5) Retunisasi, pengawasan gaya ini sering dalam tindakannya dengan usaha pemberatasan perilaku. Alat yang digunakan : tugas, peraturan, dan prosedur. Pengaturan ketaan azas, dapat dipercaya, dan dapat diramalkan.
- 6) Direksi dan *surveillance*, perilaku diawasi dari laur dengan direksi (pengarahan orang lain). Direksi atau komando didukung oleh adanya kekuasaan dan kewenangan.
- 7) Regulasi, pengawasan melalui regulasi pendekatan sasaran, peranan perilaku memilih perilaku yang menghasilkan keluaran. Sistemnya menggunakan sibernetik. Tindakan dilakukan, hasil diukur, dibandingkan dengan standar, penyimpangan dicatat, dan alternatif tindakan dipilih.
- 8) Perencanaan, pengawasan melalui perencanaan dengan pendekatan hasil. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan tidak hanya mengubah elemen dalam sistem, tetapi mengubah suatu sistem dengan sistem lainnya.

f. Macam teknik pengawasan

Siagian (2008:139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :

1) Pengawasan Langsung (direct control)

Adalah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbrntuk: (a) inspeksi langsung,(b) on the spot observation,(c) on the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyangknya dan kompleksnya tugas-tugas

seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2) Pengawasan tidak langsung (indirect control)

Adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

g. Bentuk- bentuk pengawasan

Menurut Nurcholis (2008:313) Pengawasan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Menurut pandangan ini, pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintah agar tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau perundangan lainnya.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang berupa penanguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang di nilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Ukas (2004:343) menyebutkan ada tiga fase pengawasan yaitu:

1) Pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas.

2) Pengawasan tengah berjalan

Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahan pun dapat melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang.

3) Pengawasan akhir

Pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

h. Tujuan pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dilakukan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumannya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

Menurut Ukas (2004:337) mengemukakan tujuan pengawasan terdiri dari tiga tujuan, yaitu:

- 1) Mensuplai pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- 2) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil yang diharapkan

Siumorang dan Juhir(1994:22) maksud pengawasan yaitu:

- 1) Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan yang tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Ranchman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta. Mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah:

- 1) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- 3) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam bahasa Inggris bias disebut sebagai *government*, dimana kata itu berasal dari istilah Yunani gubernaculum yang artinya kemudi. Pemerintah biasa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Adapun didalam ilmu pengetahuan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintah, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Apapun menurut Nisjar dalam Sunarso (2012) istilah *governance* secara farifah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa Inggrisnya *guildin*. Hal ini juga senada dengan Budi (2009) yang mendefinisikan pengertian pemerintah secara etimologi kata "Perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan suatu kegiatan, yang bersifat

menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan “memerintah” atau “diperintah”. Dengan demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yang memerintah atau menyuruh, dan di perintah atau disuruh artinya yang memerintah mempunyai kuasa untuk menyuruh kegiatan yang bersifat perintah. Sedangkan yang di perintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Setelah di tambahkan awalan “Pe” menjadi “Pemerintah”, dapat diartikan sebagai badan, lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan untuk memerintah.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota yang dipilih secara demokrasi. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Konsep Pengelolaan Limbah Industri

Limbah cair merupakan hasil kegiatan yang sengaja dibuang dalam bentuk cair. Limbah cair merupakan campuran antara air dengan bahan-bahan lainnya baik yang larut maupun tersuspensi dalam campuran tersebut (Soeparman dan Suparmin. 2002). Secara fisik, air limbah memiliki karakteristik yang diamati dari suhu, warna, bau, dan kekeruhan. Suhu air limbah umumnya lebih tinggi dari suhu air pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan pada air limbah terjadi aktivitas mikroorganisme, aktivitas pelarutan gas-gas dalam air limbah, serta aktivitas pelekatan bahan-bahan dalam air limbah yang meningkatkan suhu di dalam air limbah. Warna air limbah umumnya berwarna abu-abu (grey water) atau berwarna hitam (black water).

Warna abu-abu air limbah berasal dari campuran berbagai residu bahan organik dan anorganik yang menghasilkan perubahan warna pada air. Jika air limbah berwarna abu-abu (grey water) tercampur dengan sampah bahan makanan, urin, dan feses akan menghasilkan air limbah berwarna hitam (black water). Bau dari air limbah bervariasi sesuai dengan komposisinya. Bau air limbah abu-abu (grey water) umumnya berbau tengik, bau air limbah hitam (black water) berbau busuk dikarenakan adanya proses dekomposisi dari urin dan feses dalam air limbah, sedangkan bau dari air limbah industri memiliki bau spesifik yang berbeda dari air limbah lainnya. Air limbah lebih keruh dari air biasa. Kekeruhan air limbah dipengaruhi oleh padatan yang terlarut maupun padatan yang tersuspensi dalam air limbah. Air limbah abu-abu (grey water) umumnya memiliki tingkat

kekeruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan air limbah hitam (black water) dan air limbah industri (Sperling. 2007).

Karakteristik Kimia dari air limbah adalah kandungan berbagai macam bahan organik dan anorganik yang ada di dalam air limbah. Kandungan bahan-bahan tersebut mempengaruhi kualitas parameter kimia dalam air limbah yang mencakup pH, BOD, COD, serta penentuan tingkat kandungan bahan kimia yang berbahaya seperti fosfor, nitrogen, dan klorida. Karakteristik Biologi dari air limbah umumnya mengandung berbagai jenis organisme yang tumbuh akibat adanya kandungan bahan organik dalam limbah sebagai bahan makanan. Jenis organisme yang umum ada di dalam air limbah yaitu bakteri, jamur, virus, maupun organisme air sejenis (Sperling. 2007).

Berdasarkan sumber penghasilnya, limbah cair dibagi menjadi dua jenis yaitu air limbah industri dan air limbah domestik (Helmer dan Hespanhol (eds). 1997)

a. Air limbah industri

Air limbah industri merupakan air limbah dari berbagai kegiatan industri yang mencakup proses produksi hingga proses penunjang kegiatan industri (Spellman. 2008). Terdapat banyak tipe air limbah industri sesuai dengan jenis industrinya. Beberapa jenis industri memiliki jenis polutan yang berbeda-beda dalam limbahnya.

b. Air limbah organik industri

Air limbah organik industri merupakan air limbah dengan kandungan bahan-bahan residu berupa senyawa organik yang berasal dari proses produksi

industri yang membutuhkan penggunaan bahan kimia organik sebagai pereaksi. Beberapa industri penghasil air limbah organik industri meliputi industri obat, kosmetik, bahan pembersih, tekstil, kertas, dan industri kulit. Pada industri tersebut, proses produksi menggunakan berbagai campuran bahan-bahan alami dan sintetis untuk memproduksi berbagai jenis produk yang dipasarkan. Proses tersebut menghasilkan air limbah yang memiliki kualitas yang buruk dengan kisaran COD 5.000-15.000 mg/L sehingga memerlukan metode pengolahan yang efektif untuk mengolah limbah tersebut sebelum dibuang ke perairan (Hanchang, 2009).

c. Air limbah anorganik industri

Air Limbah anorganik industri merupakan air limbah yang mengandung residu berupa senyawa anorganik yang berasal dari proses produksi. Air limbah anorganik tersebut umumnya dihasilkan oleh industri logam dan industri mineral bukan logam. Air limbah yang dihasilkan industri tersebut banyak mengandung padatan terutama padatan tersuspensi. Selain padatan, air limbah tersebut juga mengandung polutan sianida, asam, dan flourida. Polutan sianida dan asam yang berasal dari proses pembakaran logam dan proses pendinginan logam, sedangkan flourida dihasilkan pada proses pemurnian logam khususnya aluminium. Oleh karena itu, air limbah anorganik memerlukan pengolahan sebelum dibuang dikarenakan sifatnya yang berbahaya dan toksik (Hanchang, 2009)

d. Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan sesuai definisi pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Industri

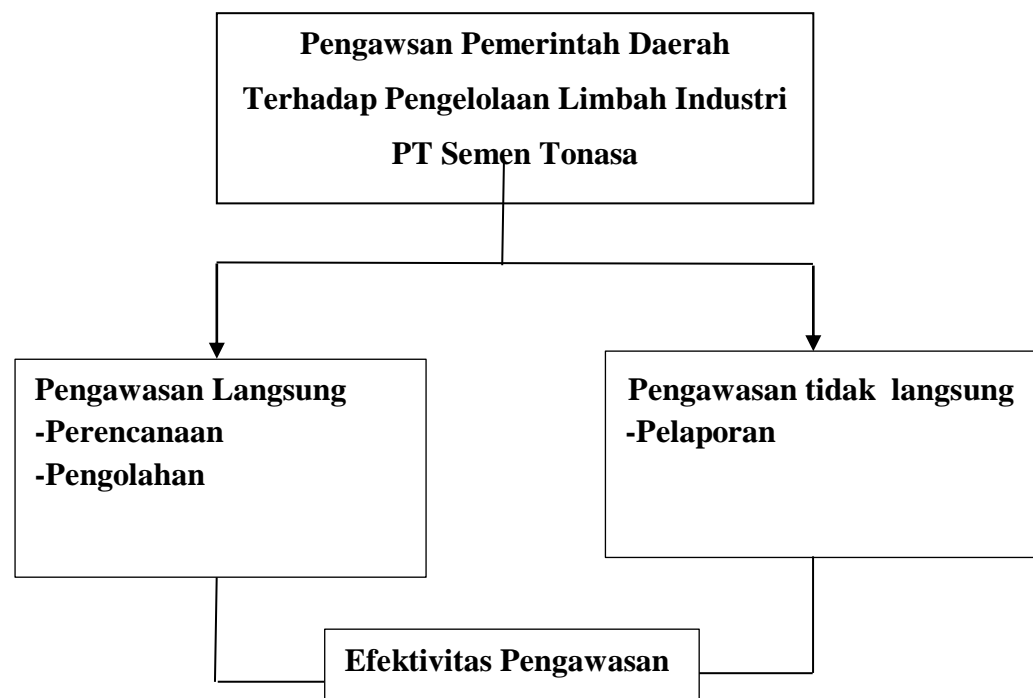
Limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah daerah dimana wilayahnya terdapat industri. Pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang dan yang terpenting harus melakukan pengelolaan limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batas yang diperbolehkan. Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan badan lingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi. Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan

antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah harus mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan limbah industri, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada di semen tonasa.

C. Kerangka Pikir

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak limbah industry semen tonasa terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk semen tonasa. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap

perencanaan dan pelaksanaan usaha semen tonasa serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembagunan secara efisien dan efektif, di samping di perlukan system perencanaan yang baik juga diperlukan system pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaiin sasaran dan tujuan pembagunaan nasional. Maka harus adanya pengawasab secara efektif sehingga teori yang dipakai adalah proses pengawasan menurut Handoko (1998:364). Untuk memudahkan dalam mengetahui kerangka pemikiran pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan berikut ini



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas penelitian agar jelas ruang lingkungannya yang akan diteliti. Untuk itu, fokus penelitian yaitu tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri pt. Semen tonasa di kabupaten Pangkep.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan Langsung adalah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) on the spot observation, (c) on the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Pengendalian Resiko.
3. Pengolahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah dampak maupun semua kegiatan penunjangnya. Pengelolaan harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan juga meningkatkan dampak positif.

4. Pengawasan tidak langsung Adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukakan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbrntuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.
5. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan yang dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.
6. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan tercapai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep yang di rencanakan akan berlangsung selama bulan September sampai bulan November. Alasan memilih Kabupaten Pangkep sebagai lokasi penelitian karena melihat kondisi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri yang semakin kurang efektif.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang berkaitan dengan hal agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT. Semen Tonasa di kabupaten pangkep

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT. Semen Tonasa Studi kasus ini adalah memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang di teliti, dengan menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang di kaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Guna memperdalam analisis data yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah daerah, maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Penentuan informan penelitian terlebih dahulu diidentifikasi para aktor yang terlibat dalam pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Sekertaris Badan Lingkungan Hidup, Depertemen Jaminan Mutu Lingkungan , Kepala Desa dan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan sebagai berikut:
Keadaan informan penelitian menurut inisial dan jabatan/status.

NO	Nama	Inisial	Jabatan	Ket.
1.	Najhar.ST	NJ	Pengolah dokumen Amdal dan UKL/UPL	1
2.	Muh. Arysad	AR	Depertemen jaminan Mutu lingkungan	1
3.	Andi safri syam, S.sos	SF	Kepala Desa	1
4.	Muh. Idris	ID	Masyarakat	1
5.	Sofyan	SF	Masyarakat	1
6.	Aswin	AS	Masyarakat	1
Jumlah				6

Gambar 1.2 Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap obyek penelitian di Desa Biring EreKecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
2. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada semua informan yang ada tentang Pengawasan Pemerintah

Daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT. Semen Tonasa . Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antara informan satu dengan yang lain.

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart*, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.

G. Pengabsahan Data

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

b. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

c. Triangulasi, guna keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumbernya itu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.

Triangulasi Waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, bisa disingkat pangkep adalah salah satu kabupeten di Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki batas wilayah 1.112,29 km, tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 km dan luas wilayah daratan 898,29 km dan wilayah laut 11.464,44 km. Berdasarkan letak astronomi, kabupaten pangkajene, dan kepulauan berada pada 11.00' Bujur Timur, dan 040.40'-080.00' Lintang Selatan.

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan 12.362,73km² (setelah diadakan analisis bakosurtanas) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 km², dengan daratan seluas 898,29km², dan panjang garis pantai di kabupaten pangkajene, dan kepulauan yaitu 250 km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Batas administrasi, dan batas fisik administrasi, dan batas fisik kabupaten pangkajene, dan kepulauan adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Madura, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu :

1. Wilayah Daratan

Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah daratan rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa sumber daya alam, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan kabupaten pangkajene dan kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Labbakang, Kecamatan Ma'rang Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

2. Wilayah Kepulauan

Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan kabupaten

pangkajene dan kepulauan yaitu : Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tubabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, dan kecamatan Liukang Tangaya. Kabupaten Pangkep berpenduduk sebanyak 300 jiwa. Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. Pangka berarti cabang, je'ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang. Jika kita menelusuri asal muasal pemberian nama-nama kampung yang telah di sebutkan di atas menurut beberapa sumber penulis hal itu berkaitan erat dengan perebutan hegemoni kekuasaan Gowa dan Bone di bekas kerajaan Siang dan Barasa (disebut Bundu Pammanakang).

Kampung yang disebut Pabbundukang itu awalnya adalah sebuah padang yang cukup luas, dimana menjadi tempat pertempuran antara lascar Bone dan Gowa, sedangkan Kampung Sabila diambilkan dari nama bangsawan Bone-bone, yang pernah dihuni oleh mayoritas orang Bone. (Taliu,1997 dalam Makkulu,2008) Kampung Tumampua awalnya adalah kampong yang dihuni mayoritas orang-orang berdarah Siang dengan menggunakan Bahasa Bugis, sedangkan kelurahan jagong dihuni oleh mayoritas orang-orang Gowa yang menuturkan bahasa Makassar. Menelusuri sejarah kelahiran suatu daerah atau ibukota suatu daerah mempunyai makna yang cukup penting oleh karena dalam usaha tersebut akan terkait pula usaha untuk mengkaji kembali berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa silam di daerah tersebut, baik aspek sosial, budaya, politik pemerintahan, ekonomi, hukum maupun aspek keamanan pertahananya.

B. Karakteristik PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep

PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari kota Makassar. Pabrik semen tonasa unit 1 merupakan proyek di bawah Departemen Perindustrian dan merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah ceko-slowakia yang dimulai sejak tahun 1960 dan pembangunan pabrik semen tonasa unit IV yang berlokasi tidak jauh dari unit II dan III yaitu desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Pabrik Semen Tonasa IV dikerjakan secara swa-kelola oleh PT. Semen Tonasa dibantu oleh PT Rekayasa Industri sebagai konsultan. Pabrik Semen Tonasa Unit IV diresmikan oleh Presiden Suharto pada tanggal 10 september 1996, dengan kapasitas terpasang 2.300.000 ton per tahun dan menggunakan teknologi canggih. Pabrik baru ini mulai dioperasikan secara komersial pada tanggal 1 November 1996 dengan tahap percobaan terak (klinker), maka kapasitas terpasang produksi PT. Semen Tonasa untuk tahun 1996 menjadi 3.480.000 ton per tahun.

Guna melengkapi sarana distribusi penjualan dan menjadikan perseroan sebagai pemasok terbesar di kawasan tersebut, PT. Semen Tonasa telah menyelesaikan penggunaan 8 (delapan) Unit pengantongan semen yang berlokasi di Bitung, Palu, Banjarmasin, Kendari dan Ambon dengan kapasitas masing-masing 300.000 ton semen per tahun serta di Makassar, Bali dan Samarinda dengan kapasitas 600.000 ton semen per tahun. Sarana pendukung operasi lainya yang berkontribusi besar terhadap pencapaian laba perusahaan

adalah utilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas UW yang berlokasi di pelabuhan Biringkasi, Desa Bulu Cindea, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari lokasi pabrik. Pendapatan utama perseroan adalah hasil penjualan *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cemen* (PCC) terbesar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Didukung dengan merk produk yang solit di Kawasan Timur Indonesia, perseroan berusaha secara terus menerus memperthankan *brand image produk* dengan menjaga kestabilan pasokan produk di pasar semen, selain itu dukungan sistem distribusi yang optimal juga merupakan unsure kesuksesan penjualan semen perseroan. Disamping itu, penjualan ekspor juga di lakukan perseroan jika ada permintaan pasar, seperti Timor Leste, Banladesh, Filipina dan Brunai Darusalam.

Perseroan menyadari bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari *stakeholder* yang tidak dapat dipisahkan keberadaanya dalam suatu perusahaan. Mengingat pentingnya tenaga kerja dalam kelangsungan usaha, maka kondisi keselamatan karyawan harus dijamin. Hal ini sudah menjadi komitmen manajemen Perseroan untuk menciptakan lingkungan serta penyakit akibat kerja. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, sejak tahun 2000 Perseroan telah menetapkan bagian dari penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Penerapan sistem manajemen ini diwujudkan melalui pemberian sertifikat audit dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan predikat tertinggi yaitu “Bendera Emas” sejak bulan januari 2004.

Perlindungan lingkungan merupakan kebijakan manajemen dalam upaya menjamin pembagunan yang berkelanjutan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara terus menerus dilaksanakan oleh perseroan bekerja sama dengan institusi luar yang terkait. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan telah dimulai sejak berdirinya Pabrik Perseroan dan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan. Salah satu upaya pengelolaan lingkungan adalah dilakukannya “*update*” penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dari versi 2004 dan dinyatakan sesuai Badan Sertifikat Internasional. Komitmen Manajemen Lingkungan adalah “ Menjadi produsen yang ramah lingkungan ” yang diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan peraturan yang berlaku; meminimalisasi dampak negative dari produsen dan produk yang dihasilkan; pelaksanaan program efisiensi pemakaian sumber daya alam dan energi; melaksanakan kegiatan konservasi lahan bekas tambang; serta membina hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Keberhasilan ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari pemerintah pada program “PROPER” dengan predikat “HIJAU”.

Sebagai perusahaan yang senantiasa memberikan kepada pelanggan serta salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam menghadapi persaingan ketat industri, maka mulai dari pengadaan bahan baku, proses dan produk akhir yang mencakup semua kegiatan operasional Perseroan selalu diupayakan memenuhi persyaratan mutu ISO 9001 sejak tahun 1996, Perseroan telah mendapatkan pengakuan Internasional terhadap mutu produknya dengan label ISO 9002. Tidak hanya itu konsistensi dan tekad yang kuat PT.Semen Toanasa untuk tetap unggul

dan berdaya saing, terlihat dari sistem manajemen perseroan dengan istilah sistem Manajemen Semen Tonasa yang berorientasi pada manajemen terintegrasi, mutu produk, lingkungan, kesehatan kerja.

Melihat kondisi bahwa, saat ini PT. Semen Tonasa telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjadi perusahaan persemenan yang unggul dan berdaya saing, PT. Semen Tonasa agar tetap unggul dan berdaya saing sebagai perusahaan persemenan. Terdapat beberapa langkah strategis dalam Tonasa Unggul dan Berdayasaing, antara lain PT. Semen Tonasa dapat mengimplementasikan kebijakan atau strategi-strateginya sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya, mengambil keputusan-keputusan dengan berlatar belakang pada pengalaman yang dimiliki. Selain itu Pimpinan ataupun Direksi PT. Semen Tonasa harus bersikap proaktif dengan mendorong karyawan untuk mau peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, tidak bersikap pasrah pada keadaan dan kemauan untuk mencari berbagai peluang pasar bagi produk dan mendahului pesaing dalam mengenalkan produknya.

C. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Industri

PT.Semen Tonasa Kabupaten Pangkep

1. Pengawasan Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan serta Pengawasan pemerintah daerah terhadap

pengelolaan limbah industri PT.Semen Tonasa di Desa Biring Ere ini benar-benar diperlukan adanya pengawasan langsung dari pemerintah daerah dan pihak yang terkait, tidak hanya dampak positifnya saja yang dapat dimanfaatkan/di pergunakan tetapi juga dari dampak negatifnya dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kita ketahui bahwa kehadirannya limbah pabrik Semen Tonasa dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, akibat adanya dampak pencemaran lingkungan yang berakibat pada lingkungan sosial dimasyarakat.

Pemerintah daerah adalah salah satu pemerintah yang mengembang fungsi pengawasan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan pengawasan langsung dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis. Sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga bentuk utama yakni ekonomi, lingkungan dan sosial. Dari ketiga bentuk diatas perlu dilakukan pengawasan yang efektif dari pihak yang bertanggung jawab mengawasi lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dari komponen lingkungan yang terkena dampak akibat langkah kegiatan- kegiatan eksplorasi(kegiatan peledakan), penyimpanan bahan bakar batubara, operasional pabrik (emisi cerobong), dan mobilisasi hasil produksi pabrik di Biring Ere ke Biringkasi pengawasan langsung terdiri dari dua bagian dan jawaban dari masing-masing informan pada tiap indikator adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Industri PT.Semen Tonasa dalam Perencanaan merupakan awal kegiatan, fungsi yang lain akan bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan organisasi perusahaan dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi program, taktik cara melaksanakan program dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi (perusahaan). Oleh karena itu, pengertian perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyaistandar, bersifat sederhana, mempunyai standar fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Perencanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembagunaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang di atur dengan peraturan daerah ini membuat rencana salah satu dari rencana tersebut yaitu pemantauan lingkungan. Kaitanya dengan Badan Lingkungan hidup sebagaimana hasil wawancara dengan Badan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Dari sesuai kewenangan kami kita itu selalu turun melakukan pengawasan perusahaan salah satu dari fungsi pengawasan adalah seberapa besar ketaatannya terhadap perusahaan terkait kewajibannya untuk melakukan pengawasan pengelolaan dan pemantuan lingkungan biasanya kita turun bersama tim ke industri untuk mengawasi terkait pengendalian pencemaran airnya, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan” (Hasil wawancara dengan NJ, 27 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan memberikan keterangan kepada penulis bahwa selama proses pengawasan dari pihak BLH Pangkep telah melakukan fungsi dan kewajibannya dalam pengawasan dan pemantuan secara rutin tiap tahun untuk mengawasi dan melakukan pemantuan terhadap pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.

Adapun hasil wawancara oleh pihak Depertemen Jaminan Mutu dan Lingkungan yang menyatakan bahwa :

“Hampir setiap hari melakukan pengawasan dipabrik salah satunya adalah melakukan pemantuan lingkungan hidup untuk mengendalikan pelaksanaan manajemen dampak signifikan oleh operasional pabrik maupun operasional menunjang lainnya sehingga benar-benar dapat meminimalkan dampak negatif dan bisa meningkatkan dampak positif bagi masyarakat setempat di sekitar lokasi perusahaan” (Hasil wawancara dengan MA, 28 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa pengawasan dalam tehnik pemantauan pihak JAMULI juga melakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil pantau sesuai yang terjadi dilapangan, pemantuan lingkungan hidup dan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan, Berikut adalah hasil wawancara dari informan dengan Kepala Desa Biring Ere yang menyatakan bahwa :

“Seperti yang diharapkan saya sebagai selaku Kepala Desa dengan adanya operasional pabrik PT.Semen Tonasa ini pengawasan dalam segi pemantauan yang dilakukan pasti lebih difokuskan dari pihak terkait dan diutamakan untuk menghindari dampak lingkungan yang pastinya dapat merugikan kesehatan masyarakat, pemantauan secara rutin harus selalu dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa yang terjadi selama pabrik semen beroperasi, dimana masyarakat masih mengeluhkan debu khususnya dari cerobong pabrik yang terjadi secara terus menerus dan peledakan di lokasi

tambang yang terjadi di waktu-waktu tertentu dapat mengganggu pernafasan, tidak hanya diluar rumah, tetapi juga debu emisi dan tambang ditengarai telah masuk hingga kedalam rumah dan mencemari udara dalam rumah. Selain berdampak pada gangguan pernafasan, debu juga dapat menjadi pencemar sumber air warga, khususnya bagi warga yang menggunakan penampungan air hujan (PAH). Sehingga ada masyarakat yang tidak menggunakan air hujan lagi sebagai sumber airnya.itulah keluhan yang di terima dari masyarakat” (Hasil wawancara dengan MA, 29 September 2016).

Berdasarkan hasil yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa Kepala Desa juga melakukan pemantauan dimasyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi tentang keluhan dengan adanya Pabrik Semen Tonasa di Desa Biring Ere, hal tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh Masyarakat Desa Biring Ere sebagai berikut :

“Kami selaku masyarakat sangat mengeluhkan dampak yang di timbulkan oleh operasional pabrik terutama debu dari cerobong pabrik yang hampir setiap hari mencemari lingkungan yang mengganggu kesehatan kami seperti ISPA, Batuk, dan Influenza” (Hasil wawancara dengan SF,30 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat sangat mengeluhkan dampak yang ditimbulkan oleh pabrik yang hampir setiap hari mencemari lingkungan yang mengaggu kesehatan masyarakat. Hal tersebut senada dengan keterangan yang diberikan oleh masyarakat Desa Biring Ere sebagai berikut :

“Perencanaan tersebut dari pihak perusahaan sebagaimana perencanaan itu berjalan dengan kurang baik karena sampai saat ini pemukiman dekat pabrik itu kita sebagai masyarakat sulit mengakses air bersih” (Hasil wawancara dengan MI,30 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pengawasan atau fungsi pengawasan belum berfungsi secara efektif jika ditinjau dari segi perencanaanya karena perencanaan dari pihak PT.Semen Tonasa kesejahteraan masyarakat seperti sulitnya mengakses air bersih sehingga

masyarakat desa pemukiman sekitar PT.Semen Tonasa akan berdampak pada kesehatan mereka.

Pendapat berbeda juga dikemukakan oleh Masyarakat Desa Biring ere yang mengatakan bahwa :

“Kami selaku masyarakat mengerti dengan adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan pada pabrik industri PT.Semen Tonasa, tapi disini lain kami bangga dengan adanya perusahaan sebagian warga masyarakat yang dekat pabrik diangkat menjadi pegawai PT.Semen tonasa” (Hasil wawancara dengan AS,30 September 2016).

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar PT.Semen Tonasa paham dengan adanya dampak yang ditimbulkan pada pabrik PT.Semen Tonasa namun masyarakat sekitar PT.Semen Tonasa mengapresiasi dengan adanya PT.Semen Tonasa sebagai perusahaan di kampung mereka. Oleh karna itu pengawasan ini memang diperlukan data-data akurat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

b) Pengolahan

Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah industri PT. Semen Tonasa dalam pengolahan bertujuan terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Agar tujuan tersebut tercapai maka sejak awal perencanaan sudah harus memperkirakan perubahan kondisi lingkungan baik yang positif maupun yang negatif, dengan demikian dapat dipersiapkan langkah-langkah pengelolaannya, cara untuk mengkaji perubahan kondisi tersebut melalui studi AMDAL. bahwa penyelenggaraan pembanguna dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu adanya peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di maksud adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan dalam kaitannya dengan pemerintah daerah dan pihak yang ikut serta dalam pengawasan pengelolaan Limbah PT .Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Departemen Jaminan Mutu Lingkungan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“ Kalau kita berbicara tentang pengelolaan Limbah dari Operasional Pabrik itu sangat luas, salah satu dari pengelolaan tersebut yang sangat mengganggu masyarakat, pencemaran udara dan kebisingan apabila tingkat debu telah mencapai batas yang di tentukan, tindakan yang harus dilakukan adalah memperbaiki alat penangkap debu, memasang rambu batas kecepatan laju kendaraan, menyiram jalan, menanam pohon, melakukan penyiraman sebelum melakukan pengangkutan material tambang, khususnya di sekitar kantor dan permukiman masyarakat. Apabila tingkat kebisingan di area lebih dari 85 DBA, sumber kebisingan dipasang Silincer dan pekerja diharuskan menggunakan peralatan pelindung kebisingan yaitu ear plug” (Hasil wawancara dengan MA, 10 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa , adapun hasil wawancaranya oleh Department Jaminan Mutu Lingkungan adalah dalam pengelolaan limbah dari operasional pabrik yang sangat luas karena pengelolaan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar yaitu pencemaran udara dan kebisingan sehingga perlu dilakukan tindakan atau solusi agar tidak mengganggu masyarakat seperti memperbaiki alat penangkap debu,

memasang rambu batas kecepatan laju kendaraan, menyiram jalan, menanam pohon dsb.

Beda halnya dengan yang dikemukakan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“ kalau dari pengelolaan kami lihat dari arahan yang ada di dokumen AMDAL-nya PT.Semen Tonasa terkait pengelolaan dan pemantuan lingkungan terkait pengelolaan dan pemantuan lingkungan misalnya upaya pengelolaan pencemaran udara harus melakukan pemantuan kualitas udara jangan sampai udara yang di lepas kelingkungan itu melampaui baku mutu” (Hasil wawancara dengan NJ, 12 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara oleh pak NJ sebagai Badan Lingkungan Hidup adalah badan lingkungan hidup berdasarkan pengelolaannya mereka lihat dari arahan yang ada di dokumen AMDAL terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap pengelolaan pencemaran udara. Jadi, dapat dikatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup menjalankan tugasnya sesuai dengan baku mutu.

Adapun hasil wawancara oleh pak AS selaku kepala desa Biringere tentang pengelolaan adalah sebagai berikut :

“Dalam proses pengelolaan saya cuma dilibatkan untuk memberikan informasi-informasi mengenai dampak apa yang ditimbulkan dari operasional pabrik untuk disampaikan kepada pihak perusahaan untuk ditindaklanjuti tetapi sampai sekarang dampak negatif bagi masyarakat lumayan banyak yang diterima di pemukiman sekitar area pabrik” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS selaku kepala desa Biringere dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan kepala desa belum berjalan secara efektif karena dalam pengelolaan bapak kepala desa Cuma melibatkan untuk memberikan informasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari operasional pabrik kemudian disampaikan kepada pihak perusahaan untuk

ditindaklanjuti tanpa ikut serta dalam memberikan solusi serta penanganan yang lebih ketat untuk disampaikan kepada pihak perusahaan yang terkait khususnya dalam pengelolaan limbah. Berikut wawancara dengan masyarakat Desa Biring Ere sebagai berikut :

“saya sebagai masyarakat desa Biringere jika melihat, tentang pengelolaan limbah di semen tonasa belum berjalan sebagaimana pengharapan masyarakat desa sini karena sampai sekarang dampak yang ditimbulkan masih ada” (Hasil wawancara dengan SF, 20 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Biringere melihat pengelolaan belum berjalan secara efektif karena sampai sekarang masih ada dampak yang ditimbulkan akibat pengolahan limbah di semen tonasa. Jadi dapat dikatakan pengolahan limbah belum berjalan secara efektif.

Adapun hasil wawancara dengan pak ID selaku Masyarakat Desa Biring ere yang menyatakan bahwa :

“Pengelolaan limbah industri dikelola langsung oleh pihak perusahaan agar bisa meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan di area pabrik dekat pemukiman masyarakat” (Hasil wawancara dengan ID, 20 Oktober 2016).

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan limbah industri PT. Semen Tonasa sudah berjalan dengan baik karena pengelolaan limbahnya dikelola langsung oleh pihak perusahaan agar dampak yang ditimbulkan ke masyarakat dapat di minimalisir.

Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Pak As selaku Masyarakat Desa Birng Ere yang mengatakan bahwa:

“Berbicara masalah pengelolaan lingkungan tidak terlepas dari pada kesehatan, belum lagi masalah polusi udara disebabkan banyaknya kendaraan setiap harinya pabrik industri yang beroperasi, inilah yang menyebabkan

kesehatan kita terganggu dari pengolahan kami selaku masyarakat melakukan penghijauan dan menanam pohon ” (Hasil wawancara dengan As, 20 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat melihat pengawasan dampak PT.Semen Tonasa memang sangat berdampak pada kesehatan namun bukan hanya PT.Semen Tonasa saja memberi dampak kepada masyarakat namun polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan setiap hari namun masyarakat sekitar perusahaan melakukan penghijauan agar dampak yang ditimbulkan dapat di minimalisir.

2. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau subyek yang dilakukannya dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain; laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain, surat-surat pengaduan, berita atau artikel di mass media, dokumen lain yang terkait.

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut. Pelaporan tidak dibawa langsung oleh atasan pada waktu mengadakan pengawasan, tetapi “diantar” oleh bawahan baik dibawa sendiri maupun dikirim. Laporan dibuat oleh semua personal yang mendapat tugas dari atasan. Laporan bukan merupakan monopoli para atasan saja. Karena atasan harus membuat laporan kepada atasannya lagi. Laporan yang disampaikan kepada atasan tidak harus berupa uraian lengkap seperti memorandum akhir jabatan, atau tidak juga seperti laporan penelitian yang wujudnya tebal dengan

sistematika baku, tetapi dapat disusun mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling lengkap.

Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Berikut ini merupakan pengertian laporan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Menurut Keraf(2001: 284) dalam Rajab (2009) , laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis. Pelaporan tidak lepas dari pencatatan sebab sebelum diadakannya pelaporan dari bawahan kepada atasannya atau dari suatu instansi daerah ke instansi pusat haruslah dilakukan pencatatan mengenai hal yang akan dilaporkan kemudian dilakukan perekapan kemudian dilaporkan. Berikut adalah hasil wawancara dari informan dengan Departemen Jaminan Mutu Lingkungan yang menyatakan bahwa :

“Untuk melakukan pelaporan kami melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setelah pemantauan kami pihak perusahaan mengevaluasi pelaksanaan RKL dan RPL AMDAL pengembangannya yang meliputi kajian terhadap beberapa komponen lingkungan yang terkena dampak operasional pabrik dan seluruh penunjangnya yaitu : kualitas udara, kualitas air, kebisingan, biota perairan, biota darat (flora dan fauna), transportasi, dan sosial-ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pabrik kemudian kami penyusun laporan tersebut untuk kita berikan kepada pihak BLH untuk mengkaji ulang atau menganalisis laporan tersebut”(Hasil wawancara dengan AS, 25 Oktober 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Department Jaminan Mutu Lingkungan dapat disimpulkan bahwa mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap

kegiatan pengelolaan lingkungan karena mereka memberikan sepenuhnya kepada pihak BLH untuk mengkaji ulang terkait pelaporan komponen lingkungan yang terkena dampak operasional pabrik dan seluruh penunjangnya, namun seharusnya pihak Department Jaminan Mutu Lingkungan yang bertanggung jawab dan meneliti terkait pelaporan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh pengelola dokumen Amdal yang mengatakan bahwa :

“Dari sesuai kewenangan kami kita itu selalu turun melakukan pengawasan perusahaan selama 2x dalam setahun minimal 6 bulan sekali, pihak perusahaan selalu memberikan laporan kemudian kami mengkroscek apakah laporan itu sama dengan kondisi dilapangan misalnya ada keluhan dari masyarakat, terkait bagaimana upaya melakukan pengendalian pencemaran dan apa saja dilakukan selama 1 tahun terkait dengan pengelolaan lingkungan” (Hasil wawancara dengan NJ, 7 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara oleh pengelola dokumen Amdal dapat disimpulkan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik karena mereka turun melakukan pengawasan ke perusahaan selama 2x dalam setahun dan pihak perusahaan selalu memberikan laporan serta mendengar keluhan masyarakat terkait upaya pengendalian pencemaran yang meresahkan masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan pak AS selaku kepala desa Biringere yang menyatakan bahwa :

“kami pihak Kepala Desa wajib melaporkan tentang keluhan masyarakat setelah Pihak PT.Semen Tonasa sangat menerima keluhan kami Alhamdulillah kami di berikan batuan berupa CSR, Pengobatan gratis bagi yang terkena dampak, memberikan air bersih atau melakukan penyiraman di daerah yang berdekatan dengan pemukiman seperti di kelurahan Bontoa. Salah satu wujud dan tanggung jawab sosial mereka terhadap penduduk yang ada disekitar pabrik, tapi masyarakat masih menganggap bantuanya kurang khususnya daerah Biringere, Tarawean, Magilu, dan Bontoa belum cukup dibanding dengan debu yang diperoleh setiap hari pada ke 4 desa/kelurahan ini mengharapakan porsi bantuan lebih layak

disbanding tahun-tahun sebelumnya agar keresahan dan kesenjangan sosial lebih teratasi”(wawancara dengan AS, 10 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala desa Biringere dapat disimpulkan bahwa kepala desa ini mendengar serta menyampaikan keluhan masyarakat terkait masalah pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwenang di PT. Semen Tonasa dan pihak tersebut menyikapi dan memberikan bantuan berupa berupa CSR, Pengobatan gratis bagi yang terkena dampak, memberikan air bersih atau melakukan penyiraman di daerah yang berdekatan dengan pemukiman seperti di kelurahan Bontoa.

Adapun hal lain yang dikemukakan pak Sf selaku Masyarakat Desa Birigere mengatakan bahwa :

“Pelaporan kami kita hanya dilibatkan untuk melaporkan secara langsung tentang keluhan kami kepada kepala desa, terus kepala desa ini menyampaikannya atau bersurat ke perusahaan” (wawancara dengan Sf, 10 November 2016).

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait dengan pengawasan pelaporan masyarakat mereka melaporkan secara langsung keluhannya kepada kepala desa dan kemudian kepala desa yang meneruskan baik secara lisan maupun tulisan keperusahaan. Hal tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh Masyarakat Desa Biringere sebagai berikut :

“Kami diwajibkan melaporkan kepada perusahaan karena ini bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan” (wawancara dengan As, 10 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara oleh Masyarakat Desa Biringere sangat diharapkan laporanya akibat pencemaran lingkungan ini bentuk rasa kepedulian perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan kesehatan serta lingkunganya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian merumuskan kesimpulan terkait dari Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Industri PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep dengan melihat tehnik pengawasan yang menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung meliputi :

- a) Perencanaan selama proses pengawasan dari pihak BLH telah melakukan fungsi dan kewajibannya dalam pengawasan dan pemantauan secara rutin tiap tahun untuk mengawasi dan melakukan pemantauan terhadap pencemaran air, pencemaran udara, pengolahan limbah B3 dan ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.
- b) Pengolahan limbah dari operasional pabrik yang sangat luas, pengolahan ini sangat yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar yaitu pencemaran udara dan kebisingan sehingga perlu dilakukan tindakan atau solusi agar tidak mengganggu masyarakat seperti memperbaiki alat penangkat debu, memasang rambu batas kecepatan laju kendaraan, menyiram jalan, dan menanam pohon.

2. Pengawasan tidak langsung berupa pelaporan disimpulkan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik karna pihak BLH dan Kepala Desa turun melakukan pengawasan langsung atau tidak langsung bahwa kepala desa ini mendengar serta menyampaikan keluhan masyarakat terkait masalah

pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwenang di PT.Semen Tonasa dan pihak tersebut menyikapi dan memberikan bantuan bagi yang terkena dampak yang berdekatan dengan pemukiman.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Pemerintah Daerah dari BLH yang terkait mengenai dampak lingkungan PT.Semen Tonasa harus lebih secara rutin lagi dalam melakukan pengawasan dan tidak henti-hentinya memantau agar hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan akan segera diatasi atau ditindaklanjuti.
2. Bagi Pihak PT. Semen Tonasa diharapkan melakukan pengawasan dilingkup perusahaan sehingga sebelum dampak lingkungan PT. Semen Tonasa tidak sampai kemasyarakat dan sudah lebih awal diketahui pihak perusahaan untuk segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait mengenai AMDAL.
3. Pihak Kepala Desa dan Masyarakat juga diperlukan bantuan informasi untuk dilaporkan ke pihak perusahaan dan pihak yang lebih bertanggung jawab mengenai dampak lingkungan PT.Semen Toanasa Kabupaten Pangkep sehingga hal yang akan menimbulkan kerugian bagi lingkup masyarakat desa Biringere tidak sampai ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminoto, cokro. 2011. *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. Online: <http://www.menulisproposalpenelitian.com>. Diakses tanggal 26 September 2016.
- Damanik, Ericson, 2016. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan Fungsional*. Online: <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id>. Diakses Tanggal 27 September 2016.
- Darmawan, Irwan, 2014. *Makalah pengertian dan fungsi pengawasan*. Online: <http://irwanxlite.blogspot.co.id>. Diakses Tanggal 28 September 2016.
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum
- Makmur, 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, J. Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mockler, Robert J. *Dasar-Dasar Proses Pengawasan*. Online: <http://manajemenkbnstan-1g2014.blogspot.co.id>. Diakses Tanggal 30 September 2016.
- Sarwoto, 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Sihombing, Ferdinan, 2009. *Fungsi Pengawasan dan Pengendalian dalam Manajemen Kesehatan*. Online: <https://nersferdinanskeperawatan.wordpress.com>. Diakses Tanggal. Diakses 1 Oktober 2016
- Sukarno K, 1992. *Manajemen Pemerintah (Plus Dua Belas Langkah Strategi)*, Tangerang : Media Brilian
- Situmorang, Viktor M. dan Juhir, Jusuf, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Daerah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Andi.
- Wibowo. 2010. *Manajemen kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.